

**INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS SINDIKAT
NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012 - 2013**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ANDRIANSYAH AULIA PERDANA
NPM. 1044110029

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
PEMINATAN/KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
SURABAYA
2014**

LEMBAR PERNYATAAN

SKRIPSI

**INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS SINDIKAT
NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012-2013**

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi atau univertas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis kecuali dituliskan dengan format kutipan dalam skripsi.

Surabaya, 24 Juni 2014

Penulis,

Andriansyah Aulia Perdana

**INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS SINDIKAT
NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012 - 2013**

Disusun Oleh :

ANDRIANSYAH AULIA PERDANA
NPM. 1044110029

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Jojok Dwiridhotjahjono, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

Mengetahui,
D E K A N

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS SINDIKAT
NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012 – 2013**

Disusun Oleh :

ANDRIANSYAH AULIA PERDANA
NPM. 1044110029

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juni 2014.

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

1. Ketua

Dr. Jojok Dwiridhotjahjono, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

Dr. Jojok Dwiridhotjahjono, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

Juwito, S.Sos, M.Si
NPT. 367049500361

3. Anggota

Drs. Saifuddin Zuhri, M.Si
NPT. 370069400351

Mengetahui,
D E K A N

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP.195507181983022001

HALAMAN MOTTO

Kegagalan bukan berarti kita tidak mampu, yang terpenting kita telah berbuat untuk mencoba.

Kegagalan bukan berarti kita telah kehilangan segalanya, mungkin belum saatnya kita mendapatkan apa yang kita cari.

Tapi kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda.

Kegagalan bukan berarti Allah mengabaikan kita melainkan Allah punya rencana lain yang lebih indah untuk kita.

Karena hidup adalah perjuangan.

Maka setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan

Dan akhir dari pengorbanan adalah kebahagiaan

Yang akan kita gapai.

Amien ya Rabb...

Halaman Persembahan

Untuk Mama Indah Betty Issabella dan Papa Anung Manubowo tersayang yang telah bersabar untuk menunggu datangnya saat ini dan yang tidak akan pernah terlupa adalah perjuangan kalian dalam membesarkan ananda, untuk itu skripsi ini saya persembahkan terutama untuk kalian...

Kedua, saya persembahkan skripsi ini untuk Angginova Permatasari yang telah mendukung dan memberikan support yang begitu besar sehingga terlaksanakannya skripsi ini..i wont forget that moment..

Tidak lupa adik – adik saya, Radhitio Pandu dan Anindya Ajeng Hanifa yang telah menceriakan suasana, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa hambatan..

Love you as always ♥♥♥♥

-Andriansyah Aulia Perdana-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberi karunia, rahmat, dan hidayah – NYA serta salam dan sholawat terhadap junjungan Umat Islam Nabi Besar Muhammad S.A.W sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Indonesia Sebagai Wilayah Operasi Strategis Sindikat Narkotika Internasional Tahun 2012-2013.”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jajok Dwiridotjahjono, S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama, dan Prihandono Wibowo, S.Hub.Int, M.Hub.Int, sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, koreksi, serta saran sehingga terselesainya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. H.Teguh Soedarto selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dra. Hj Suparwati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Juwito, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Dr. Jajok D, S.Sos, M.Si selaku Ketua Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Resa Rasyidah S.Hub.Int, M.Hub.Int Pjs Sekretaris Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Dosen-Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai berbagai macam isu-isu dalam dunia internasional.
8. Kedua Orang Tua yang paling saya sayangi, Ibu saya Indah Betty, Ayah saya Anung Manubowo, Adik saya Radhitio Pandu, dan Anindya Ajeng, serta tidak lupa Angginova Permatasari.
9. Paman saya yang memberikan bantuan dalam pengumpulan data, KANIT NARKOBA POLSEK MEDAN SATRIA POLRESTA BEKASI KOTA, AIPTU Oky Rian Hendratta, SH.

10. Semua teman – teman terbaik di Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya angkatan 2010, terima kasih banyak atas dukungannya.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan laporan skripsi ini.

Surabaya, 06 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kerangka Pemikiran	5
1.4.1 Tingkat Analisis.....	5
1.4.2 Landasan Pemikiran	6
1.4.2.1 Non-Traditional Security	6
1.4.2.2 Transnational Organized Crime	8
1.4.2.3 Geoekonomi	9
1.4.2.4 Wilayah Perbatasan (Borderland)	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14
1.5 Hipotesis	15
1.6 Metodologi Penelitian.....	15
1.6.1 Konseptualisasi dan Operasionalisasi.....	15
1.6.1.1 Geoekonomi Strategis	15
1.6.1.2 Perbatasan	17
1.6.2 Tipe Penelitian.....	18
1.6.3 Jangkauan Penelitian	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.5 Teknik Analisis Data	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II NARKOTIKA DAN PEREDARANNYA DI INDONESIA	22
2.1 Pengertian Narkotika	22
2.1.1 Dimensi Hukum Narkotika di Indonesia	24
2.2 Peredaran Narkotika di Indonesia	26
2.2.1 Peredaran Narkotika di Indonesia Tahun 2007 – 2011	26
2.2.2 Perkembangan Peredaran Narkotika di Indonesia Tahun 2012- 2013	32
2.3 Jalur Masuknya Narkotika ke Indonesia	34

2.4 Dampak Penyalahgunaan Narkoba	44
2.5 Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Pemerintah Indonesia	46
2.5.1 <i>Supply Reduction</i>	47
2.5.2 <i>Demand Reduction</i>	47
2.5.3 <i>Harm Reduction</i>	49
2.5.4 Kerjasama Luar Negeri	49
BAB III INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS	
SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012 – 2013	52
3.1 Faktor – Faktor Penarik Masuknya Sindikat Narkotika Internasional ke	
Dalam Wilayah Indonesia	53
3.1.1 Faktor Geoekonomi	53
3.1.1.1 Aspek Keruangan	54
3.1.1.2 Jumlah Populasi Penduduk Indonesia	58
3.1.2 Analisis Perbatasan	60
3.1.2.1 Perbatasan Darat	62
3.1.2.1.1 Kalimantan Timur	62
3.1.2.1.2 Kalimantan Barat	64
3.1.2.1.3 Permasalahan di Perbatasan Kalimantan	66
3.1.2.2 Perbatasan Laut	68
BAB IV KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Kerangka Pemikiran	14
Gambar	2.1	Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba	36
Gambar	2.2	Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba	41
Gambar	3.1	Posisi Negara Penghasil Narkotika Terhadap Indonesia	55
Gambar	3.2	Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia	61
Gambar	3.3	Peta Perbatasan Provinsi Kalimantan dengan Malaysia	62
Gambar	3.4	Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dengan Malaysia	64
Gambar	3.5	Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007 – 2011	31
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kasus Tersangka Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2007 – 2011	27
Tabel 2.2	Jumlah Kasus Tersangka Narkoba Berdasarkan Pendidikan Tahun 2007 – 2011	27
Tabel 2.3	Jumlah Kasus Tersangka Narkoba Berdasarkan Peran Tahun 2007 – 2011	28
Tabel 2.4	Jumlah Kasus Tersangka Narkoba Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2007 – 2011	30
Tabel 2.5	Jumlah Kasus Tersangka Narkoba Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2007 – 2011	31

ABSTRAK

INDONESIA SEBAGAI WILAYAH OPERASI STRATEGIS SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL TAHUN 2012 - 2013

Narkotika adalah zat yang umumnya digunakan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun seiring dengan berkembangnya jaman, narkotika dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan yang sifatnya hanya menguntungkan satu individu atau sindikat saja dan berdampak buruk pada para pengkonsumsinya. Perdagangan narkotika semakin besar dan mencapai lintas negara. Salah satu tujuan operasi utama sindikat narkotika internasional adalah Indonesia. Seperti halnya dengan organisasi perdagangan, sindikat narkotika internasional memilih wilayah target operasinya dengan memperhitungkan berbagai aspek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori geoekonomi, dan perbatasan untuk menganalisis kajian di dalamnya, dan tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan eksplanatif-kualitatif untuk mengolah data yang ada.

Penelitian ini menjelaskan tentang aspek geoekonomi Indonesia yang menguntungkan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan, khususnya perdagangan narkotika oleh sindikat narkotika internasional. Letak Indonesia yang strategis menarik perhatian sindikat narkotika internasional, tidak begitu jauh dari negara penghasil narkotika, dan juga jumlah populasi penduduk Indonesia yang banyak dapat meyakinkan pada sindikat untuk datang ke Indonesia. Kemudian faktor – faktor perbatasan Indonesia yang lemah membuat mereka mudah masuk untuk kemudian mendapatkan keuntungan geoekonomi Indonesia tersebut. Meningkatnya kasus narkotika di Indonesia disebabkan oleh banyaknya sindikat narkotika internasional yang beroperasi. Dalam upaya untuk mengurangi dan memberantas peredaran narkotika, pemerintah Indonesia mengandalkan Kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua pihak berwajib tersebut berhasil mengungkap banyak kasus penyelundupan dan perdagangan narkotika yang dilakukan oleh sindikat – sindikat internasional. Selain itu pihak Kepolisian dan BNN juga menjalin kerjasama luar negeri untuk mengatasi perdagangan narkotika lintas negara tersebut.

**Kata Kunci : Narkotika, Sindikat Narkotika Internasional, Penyelundupan,
Geoekonomi, Perbatasan.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi semakin meningkat pula tingkat kejahatan di masa kini. Dunia semakin *borderless*, kejahatan dapat terjadi dalam waktu yang singkat dan dapat melintasi batas-batas negara (*borderless country*). Inilah yang kemudian disebut sebagai kejahatan internasional (*Transnational Crime*).

Menurut John Broome perilaku kejahatan transnasional berkisar antara¹ : Pelanggaran cukai (*custom*) penyelundupan barang, baik barang legal maupun ilegal, pemalsuan cukai, korupsi dalam kegiatan perbankan dan keuangan internasional, penyelundupan manusia (*human trafficking*), pencucian uang, terorisme, pelanggaran atas perlindungan hak intelektual dan *cyber crime*.²

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda dunia ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih.³

¹ John Broome. 2000. *Transnational Crime in The Twenty-First Century*. pp 3. [online]. dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1238/1143> [diakses 18 Maret 2013].

² Ibid.

³ Parasian Simanungkalit. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Halaman 11.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah dibahas di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada pertemuan pertama ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) di Singapura pada tahun 1976. Pertemuan ini merumuskan rekomendasi dalam empat bidang utama: penegakan hukum dan undang-undang, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, dan pelatihan dan penelitian.

Meningkatnya permasalahan narkoba saat itu membuat ASOD semakin aktif dalam membuat kebijakan regional mengenai masalah narkoba. Kemudian pada Bulan Juli 1998, Menlu ASEAN menandatangani Deklarasi ASEAN tentang kawasan ASEAN bebas narkoba di tahun 2015.⁴ Deklarasi ini memaksa setiap anggota ASEAN untuk melakukan segala upaya untuk dapat mewujudkan hal itu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki rencana kerja dan strategi untuk memerangi perdagangan narkoba di Indonesia, tertulis dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2006, Polri berhasil mengungkap 17.355 kasus, pada tahun 2007 sebanyak 22.630 kasus, tahun 2008 sebanyak 29.364 kasus, tahun 2009 sebanyak 30.878 kasus, sedangkan untuk tahun 2010 sebanyak 26.614 kasus⁵, dan 26.500 kasus pada tahun 2011⁶. Pada tahun

⁴ ASEAN Secretariat News, 2012. ASEAN Reaffirmed Commitment Towards Drugs-free Vision. [online]. dalam <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-reaffirmed-commitment-towards-drug-free-vision> [diakses 20 Maret 2014].

⁵ GMDM, 2011. *Kasus Narkoba di Indonesia*. [online]. dalam <http://www.gmdm4nation.org/resources-24-drugsituation.html> [diakses 26 Juni 2014].

2012, kenaikan jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terlalu signifikan dari tahun 2011, hanya sebesar 0,23 persen atau meningkat sebesar 61 kasus menjadi 26.561 kasus. Pada tahun 2013, jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia kembali meningkat, kali ini dengan jumlah kasus yang signifikan yakni dari 26.561 kasus pada 2012 menjadi 32.470 kasus pada tahun 2013.⁷

Peningkatan jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia juga diakui oleh BNN. Pada tahun 2013, BNN mengungkapkan 166 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 244 tersangka. Data ini meningkat 41,88% untuk pengungkapan kasus narkoba dan meningkat 30,48% dalam jumlah tersangka dari tahun 2012.⁸

Dalam *Press Release* akhir tahun 2013, BNN menggagalkan sejumlah kasus penyelundupan narkoba yang melewati daerah perbatasan. Dalam laporan tersebut sebagian besar narkoba yang diselundupkan ke Indonesia masuk melalui wilayah perbatasan RI-Malaysia, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hingga tahun 2013 setidaknya terdapat 47 orang WNA tersangka kasus narkoba yang mendapatkan vonis hukuman mati.⁹

⁶ Antara, 2012. *Polri Ungkap 26.561 Kasus Narkoba Pada 2012*. [online]. dalam <http://www.antaraneews.com/berita/349418/polri-ungkap-26561-kasus-narkoba-pada-2012> [diakses 26 Juni 2014].

⁷ Antara, 2013. *Jumlah Kasus Narkoba Hampir 32.500 Sepanjang 2013*. [online]. dalam <http://www.antaraneews.com/berita/411384/jumlah-kasus-narkoba-hampir-32500-sepanjang-2013> [diakses 26 Juni 2014].

⁸ Pikiran Rakyat, 2013. *Meningkat, Pengungkapan Kasus Narkoba pada 2013*. [online]. dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/263656> [diakses 20 maret 2014].

⁹ BNN, 2013. Lampiran Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional.

Data ini meningkat 41,88% untuk pengungkapan kasus narkoba dan meningkat 30,48% dalam jumlah tersangka dari tahun 2012.¹⁰ Menurut Indonesia Media Monitoring Centre (IMMC), sindikat narkoba internasional di Indonesia berasal dari 10 negara diantaranya, Malaysia (44%), Australia (13%), Cina (8%), Iran (7%), Afrika (5%), India (5%), Inggris (5%), Belanda (4%), Thailand (3%), dan Nigeria (2%).¹¹

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jalur peredaran narkoba ke Indonesia berasal dari tiga negara yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos yang berupa Opium. Selain tiga negara tersebut, pemasok opium ke Indonesia adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4 ribu ton pertahun.¹² Awalnya Indonesia hanya dijadikan wilayah penjualan saja, namun kini sindikat narkoba internasional juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah produksi psikotropika untuk kemudian diedarkan ke negara tetangga bahkan hingga Australia dan Belanda.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, Indonesia menjadi tempat penjualan, produksi, bahkan transit untuk sindikat narkoba internasional. Jaringan pengedar narkoba di Indonesia semakin besar, bahkan negara pemasok narkoba pun meluas, pada tahun 2011 semula berasal dari negara ASEAN seperti Thailand, Birma, dan Laos kini

¹⁰ Pikiran Rakyat, 2013. *Loc.Cit* [diakses 20 maret 2014].

¹¹ Tribun Jogja, 2013. *Australia dan Malaysia Pemasok Narkoba di Indonesia*. [online]. dalam <http://www.kotajogja.com/berita/index/Australia-dan-Malaysia-Pemasok-Narkoba-di-Indonesia> [diakses 21 Maret 2014].

¹² Parasian Simanungkalit, *Op.Cit*. Halaman 231.

¹³ *Ibid*.

mencapai negara segitiga emas dunia, seperti Kolumbia¹⁴. Kemudian permasalahan yang muncul adalah *mengapa sindikat narkotika internasional menjadikan Indonesia sebagai wilayah operasi strategisnya?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sindikat narkotika internasional menjadikan Indonesia sebagai wilayah operasi strategisnya (pemasaran, produksi, dan transit).

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tingkat Analisis

Level of Analysis adalah kerangka kerja yang tujuannya adalah untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti utamanya dalam politik internasional.¹⁵ Menurut Olivia (2013)¹⁶, *level of analysis* adalah tempat aktor – aktor berinteraksi yang bentuk atau karakter dari sistem internasional. Sistem internasional tersebut mengubah dan mempengaruhi perilaku negara serta dinamika politik domestik sebuah negara. Menurut Patrick Morgan, level analisis ada lima macam yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.

Menurut Mas'ood, dengan menggunakan level analisis dalam penelitian, penulis akan mendapatkan banyak manfaat, diantaranya dapat menganalisis fenomena yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor, level analisis membantu peneliti untuk

¹⁴ Pikiran Rakyat, 2012. *Peredaran Narkotika di Indonesia Dikendalikan Jaringan Internasional*. [online]. dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/181169> [diakses 21 Maret 2014].

¹⁵ David J Singer. 1961. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14(1); pp.77-92.

¹⁶ Yessi Olivia, 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*.

menentukan faktor penyebab yang dominan sehingga obyek penelitian dapat lebih dipersempit, dan terakhir dapat mengurangi kesalahan dalam berasumsi.¹⁷

Level of Analysis memang memiliki banyak manfaat dalam penelitian sosial terutama dalam studi Hubungan Internasional. Level analisis dipahami sebagai alat untuk membantu peneliti memahami fenomena sosial yang terjadi, namun dalam penelitian terdapat berbagai macam metodologi yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan level analisis sehingga penggunaan level analisis adalah tidak diharuskan. Level analisis adalah alat yang opsional, penggunaannya tergantung pada peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan *level of analysis* karena obyek penelitian adalah bukan aktor negara, perilaku individual, atau perilaku kelompok, melainkan sindikat narkoba internasional.

1.4.2 Landasan Pemikiran

1.4.2.1 Non-Traditional Security

Menurut Kolodziej pengertian keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik yang menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pihak lain.¹⁸

¹⁷ Mohtar Mas'ued. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES.

¹⁸ Dili Setiawan. 2010. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi Terhadap Tumbuhnya Potensi Ancaman Non-Tradisional di Indonesia*. Halaman 58. [online]. dalam http://www.idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=30&tmpl=component&format=raw&Itemid=309 [diakses 24 Maret 2014].

Barry Buzan melihat konsep keamanan dari cara pandang yang berbeda, *narrow versus wide conception*. Buzan membedakan cara pandang tradisional yang mengidentifikasikan keamanan secara militer pada level negara menjadi fokus dalam isu-isu keamanan, sedangkan dalam dalam cara pandang non-tradisional, batasan isu dalam level yang bervariasi menjadi fokus dalam isu-isu lingkungan, manajemen sumber daya alam, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan.¹⁹

Dengan berakhirnya perang dingin, cara pandang mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi hanya dengan pendekatan tradisional tapi juga dengan pendekatan non tradisional. Konsep ini berkembang karena setelah perang dingin intensitas ancaman militer yang menargetkan serangan pada kedaulatan negara telah menurun. Namun pada sisi lain ancaman pada keamanan manusia meningkat. Seperti kemiskinan, penyakit menular, kerusakan lingkungan, bencana alam, dan kejahatan transnasional.

Non-Traditional Security (NTS) sendiri didefinisikan sebagai tantangan untuk keselamatan dan kesejahteraan seseorang atau negara yang muncul terutama dari sumber non-militer, seperti perubahan iklim, penyebaran wabah, bencana alam, migrasi yang tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan orang, peredaran narkoba dan kejahatan lintas negara lainnya.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers and Amitav Acharya, 2006. *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation* (London, Ashgate 2006) dalam Mely Cabalero-Anthony (PDF) *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community* (APSC), pp 1.

NTS memiliki beberapa karakter diantaranya, 1). mereka dalam lingkup transnasional (tidak murni domestic), 2). mereka datang begitu cepat sebagai dampak globalisasi dan revolusi komunikasi, 3). mereka tidak dapat dicegah seluruhnya, tetapi dapat dikurangi melalui mekanisme penanganan, solusi nasional tidak akan memadai, dengan demikian diperlukan kerjasama regional dan multilateral, 4). obyek keamanan tidak lagi hanya negara (kedaulatan negara atau integritas territorial) tetapi juga masyarakat, baik dalam tingkat individu dan sosial.²¹

Sindikata narkotika memiliki jaringan-jaringan di berbagai negara, hal ini membuat mereka masuk dalam lingkup transnasional selain itu ancaman yang mereka timbulkan juga dapat berdampak pada kesejahteraan suatu negara.²² Penanganan terhadap sindikat narkotika internasional harus dilakukan dengan kerjasama regional, seperti dalam organisasi ASEAN, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* dan *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*.²³

1.4.2.2 Transnational Organized Crime (TOC)

Menurut Albanese (2000), pertumbuhan *organized crime* (OC) di berbagai negara tidak lepas dari faktor pendukungnya. Terdapat lima faktor pendukung diantaranya kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, efektivitas penegakan hukum, tingkat permintaan dari suatu barang atau jasa, serta terbentuknya pasar barang dan

²¹ Ibid.

²² Parasian Simanungkalit, *Op.Cit*, Halaman 223.

²³ ASEAN, tt. *ASEAN Declaration on Transnational Crime Manila, 20 Desember 1997*. [online]. dalam <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997> [diakses 23 Maret 2014].

jasa baru melalui perubahan sosial dan teknologi.²⁴ Dengan berkembangnya teknologi, dan komunikasi semakin memudahkan OC untuk menciptakan kerjasama dengan OC di negara lainnya sehingga muncul unsur lintas negara.

Reichel (2005) menjelaskan, kejahatan transnasional mengaburkan batas-batas antar negara yang selanjutnya membentuk interkoneksi kejahatan antar negara. McCulloch (2007) dalam karyanya yang berjudul *Transnational Crime as Productive Fiction* tahun 2007, kejahatan transnasional berpenetrasi ke dalam sistem pemerintahan suatu negara termasuk sistem politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.²⁵ Mueller (2001) juga menjelaskan, *transnational crime* adalah fenomena kejahatan lintas negara yang menyinggung yuridiksi beberapa negara atau berimplikasi pada negara lain.²⁶

Wujud dari TOC yang paling krusial adalah penyalahgunaan narkoba, karena menyangkut masa depan suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda. Sindikat narkoba internasional dapat dengan mudah memasuki batas-batas negara di dunia karena didukung jaringan organisasi yang rapi dan penggunaan teknologi yang canggih.

1.4.2.3 Geoekonomi

Menurut Klaus Solberg, geoekonomi adalah studi tentang aspek ruang, budaya, dan sumber daya alam yang strategis dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan

²⁴ Albanese J.S. 2000. *The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities or Do Criminals Opportunities Create New Offenders?* Journal of Contemporary Criminal Justice, 16. Halaman 409-423.

²⁵ McCulloch J, 2007. Transnasional Crime as Productive Fiction. *Social Justice: Beyond Transnational Crime*, 34, halaman 19-32. [jurnal]

²⁶ Mueller G.O, 2001. Transnational Crime: Definitions and Concepts. In Williams, & P. a. Vlassis (Penyunt), *Combating Transnational Crime: Activities and Responses*, halaman 13-21. London: Frank Cass Publishers.

kompetitif yang berkelanjutan.²⁷ Dalam bukunya Klaus juga menjelaskan perbedaan antara geoekonomi dan geopolitik diantaranya, pertama dari kalimatnya, geoekonomi tidak berkaitan dengan kegiatan politik dan militer, melainkan hanya kegiatan ekonomi, kedua dari pelakunya, pelaku geoekonomi tidak diwakili individu yang mewakili negara, tetapi oleh pekerja sektor swasta yang sangat loyal kepada pemilik organisasi.

Geoekonomi menghubungkan antara geografi dan ekonomi menjadi geoekonomi. Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, geoekonomi diartikan sebagai kombinasi dari faktor ekonomi dan geografis yang berkaitan dengan perdagangan internasional.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa geoekonomi adalah segala faktor-faktor geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau gabungan keduanya²⁹ sebagai alat untuk mengembangkan atau meningkatkan perekonomian.

Dalam geografi terdapat beberapa konsep, diantaranya:³⁰

1. Konsep Lokasi, merupakan konsep utama dalam menjawab pertanyaan *where*. Konsep lokasi juga mengandung pengertian bahwa lokasi berpengaruh terhadap harga atau nilai sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lokasi terbagi atas lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap terhadap sistem jaring/koordinat (letak astronomis), kemudian Lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi daerah sekitarnya (letak geografis).

²⁷ Sjøilen Klaus Solberg, 2012. *Geoeconomics*. Halaman 2.

²⁸ Webster-Merriam, 2002. *Webster's Third New International Dictionary*.

²⁹ PP No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis dalam (PDF) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

³⁰ IGI, 1988. Seminar Ikatan Geograf Indonesia 1988.

2. Konsep Jarak, merupakan konsep yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Konsep jarak mengandung pengertian bahwa jarak juga berpengaruh terhadap harga nilai dan barang.

3. Konsep Keterjangkauan (*accessibility*) adalah mudah atau tidaknya suatu tempat untuk dijangkau.

Dari sudut pandang ekonomi, strategis memiliki kriteria, diantaranya:³¹

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
2. Memiliki sektor unggulan.
3. Memiliki potensi ekspor.
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi.

Tidak berbeda dengan aktor-aktor perdagangan internasional lainnya, sindikat narkoba internasional juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga dalam prakteknya mereka juga memperhatikan aspek-aspek geoekonomi, seperti aspek ruang, dan ketersediaan bahan baku produksi di suatu negara.

1.4.2.4 Wilayah Perbatasan (Borderland)

Menurut John Locke & Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. Sebuah negara dapat terbentuk karena adanya

³¹ RTRW Provinsi Papua barat, 2008. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Papua Barat. [online]. dalam www.rtrwpapubarat.info/rencana/pdf/pks-ekonomi.pdf [diakses 9 April 2014]

beberapa unsur. Dalam Konvensi Montevideo 1933 disebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam pembentukan sebuah negara diantaranya harus memiliki rakyat, memiliki wilayah yang permanen, berdaulat, berhubungan dengan negara lain, dan mendapat pengakuan (deklaratif) dari negara lain.³²

Konsep berhubungan dengan negara lain atau kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei (2001), bahwa definisi perbatasan adalah sebagai berikut :

“a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime”³³

Bentuk fisik wilayah perbatasan, menurut Guo (2005) dibagi menjadi dua pendekatan:³⁴

1. Natural Border, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti sungai, gunung, laut, danau, pantai, atau selat. Karena fungsinya untuk kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.
2. Artificial Border, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris, dan batas cultural/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideology)

³²CFR. 2013. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*. [online] dalam <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897> [diakses 8 Desember 2013].

³³ V Aelenei. 2001. *Dreptul Frontierei de Stat*. Bucharest, Vol 1, Pro Transilvania Publishing House, halaman 112.

³⁴ R Guo, 2005. *Cross border Resource Management, Theory and Praticce*. Amsterdam: Elsevier. Halaman 5.

Wilayah perbatasan tidak hanya membagi wilayah menjadi dua sistem politik yang berbeda, namun juga memiliki fungsi, diantaranya :³⁵

Menurut Guo (2005) : 1. Sebagai fungsi *legal*, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara, 2. Sebagai fungsi *control* dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah, 3. Sebagai fungsi *fiscal*, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.

Tidak semua wilayah perbatasan dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia memiliki masalah, seperti :

1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.
2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.
3. Belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.
4. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan tenaga kerja

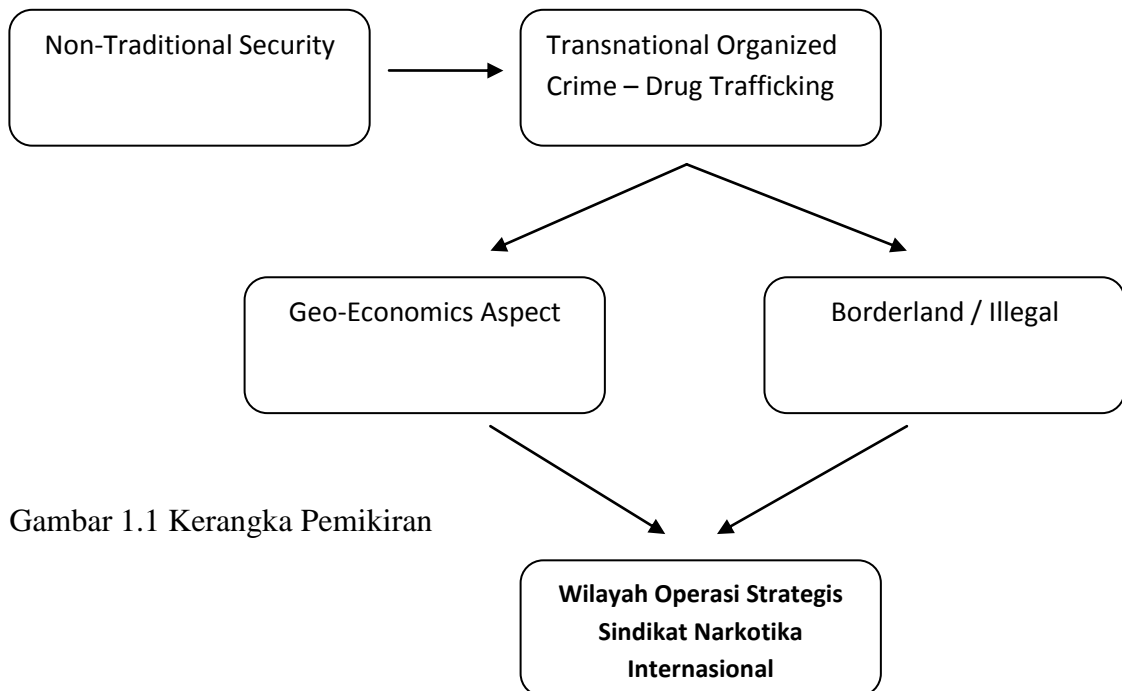
³⁵ Ibid.

5. Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri.

6. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (*CIQ/ Custom, Imigration and Quarantine*) tidak optimal dan terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas.³⁶

Poin-poin diatas dapat menjelaskan permasalahan di wilayah perbatasan sehingga sindikat narkotika internasional dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

³⁶ Wicaksono Sarosa, 2011. Dalam (PDF) Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. Halaman 4.

Sintesa Pemikiran dari penelitian ini yaitu, munculnya isu-isu NTS pasca berakhirnya perang dingin yang berupa TOC, penulis mengambil kasus perdagangan narkoba (*drug trafficking*) yang memasuki wilayah Indonesia karena faktor geoekonomi yang menguntungkan dan perbatasan Indonesia yang masih sangat kurang dalam hal keamanan.

1.5 Hipotesis

Indonesia menjadi wilayah strategis bagi sindikat narkoba internasional dalam operasinya (pemasaran, produksi, transit) dikarenakan faktor geoekonomi Indonesia yang menguntungkan seperti letak geografis yang strategis, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Selain itu lemahnya pengawasan di perbatasan juga membuat sindikat narkoba internasional dapat masuk dengan mudah ke dalam wilayah Indonesia.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Konseptualisasi dan Operasionalisasi

1.6.1.1 Geoekonomi Strategis

Definisi Konseptual: Geoekonomi adalah studi tentang aspek ruang, budaya, dan sumber daya alam yang strategis dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.³⁷

³⁷ Sjøilen Klaus Solberg, *Op.Cit*, Halaman 2.

Dalam geoekonomi terdapat konsep ruang yang terdiri dari lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan strategis apabila lokasi terletak di antara tempat-tempat yang menguntungkan, semakin dekat jarak maka semakin kecil pula biaya untuk produksi sehingga laba yang dihasilkan lebih banyak, dan keterjangkauan suatu tempat juga mempengaruhi proses pemasaran, semakin mudahnya suatu wilayah untuk dijangkau maka akan semakin cepat dan mudah suatu produk untuk masuk ke dalam wilayah tersebut.

Aspek budaya dalam geoekonomi mempengaruhi suatu hal untuk dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat setempat, tentunya mereka akan menolak segala hal yang bertentangan dengan budaya mereka dan sebaliknya, mereka akan dengan senang hati menerima hal baru tersebut, apabila tidak bertentangan dengan budaya mereka.

Aspek sumber daya sangat berpengaruh dalam geoekonomi. Suatu wilayah dikatakan strategis apabila memiliki sumberdaya alam yang melimpah, hal ini tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi wilayah tersebut. Mereka dapat memproduksi suatu barang dengan biaya yang murah, karena ketersediaan bahan baku, sehingga tidak perlu mendatangkan bahan dari luar wilayah tersebut.

Definisi Operasional: Geoekonomi adalah segala faktor-faktor geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau gabungan keduanya³⁸ sebagai alat untuk

³⁸ PP No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis dalam (PDF) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis.

mengembangkan atau meningkatkan perekonomian. Konsep geoekonomi pada penelitian ini merujuk kepada aspek ruang dan jumlah populasi di Indonesia sehingga membuat sindikat narkoba internasional tertarik untuk masuk ke Indonesia.

1.6.1.2 Perbatasan

Definisi Konseptual: Menurut Guo, perbatasan adalah garis yang membagi suatu wilayah menjadi dua sistem politik yang berbeda, yang mempunyai fungsi : sebagai fungsi *legal*, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara, sebagai fungsi *control* dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah, sebagai fungsi *fiscal*, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.³⁹

Perbatasan di bagi menjadi dua macam, perbatasan laut dan perbatasan darat. Penarikan garis batas darat suatu negara ditetapkan berdasarkan koordinat titik-titik yang telah disepakati dalam perundingan batas antar negara yang terkait. Garis batas tersebut ditetapkan secara alami (*natural*), dan secara buatan (*artificial*).

Definisi Operasional: Konsep wilayah perbatasan pada penelitian ini merujuk kepada perbatasan darat yang rawan antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta perbatasan laut di Riau. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggunakan data – data dari perbatasan darat ataupun perbatasan laut yang lain di Indonesia.

³⁹ R Guo, *Op.Cit*, Halaman 5.

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan menghubungkan variabel *Transnational Crime (drug trafficking)* dengan aspek geoekonomi dan perbatasan untuk menjawab pertanyaan mengapa sindikat perdagangan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam operasinya.

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup/jangkauan penelitian adalah batasan waktu sampai dimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan tertata sehingga dengan adanya jangkauan penelitian akan menambah batasan keabsahan data dan tidak terlampaui jauh dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan. Penelitian ini dibatasi di tahun 2012-2013, karena pada tahun itu jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya dan untuk membandingkan tingkat peningkatan, tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat penyalahguna narkoba pada tahun 2012-2013 dapat diasumsikan sebagai dampak dari banyaknya jumlah narkoba yang beredar.

⁴⁰ Rachmat Kriyantono, 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group. Halaman 69.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003) menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*.”⁴¹

Suharsimi Arikunto (2002), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Data yang dimaksud adalah wawancara dan studi dokumentasi.⁴² Sebagai tambahan, metode pengumpulan data dari internet/*online* juga dapat digunakan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, wesbsite-website resmi, serta arsip-arsip dari Badan Narkotika Nasional serta wawancara dengan petugas kepolisian Indonesia.

⁴¹ Burhan Bungin, (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif ; Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*, halaman 42. Jakarta : PT. RajaGrafindopersada.

⁴² Suharsimi Arikunto. 2002. Metodologi Penelitian. Halaman 136. PT Rineka Cipta. Jakarta

⁴³ Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik dan ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana). 2007 Hal 121. Dalam Radityo Dharmaputra (PDF) “Identitas dan Kebijakan Luar Negeri : Pengaruh Nilai Nilai Eurasianisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia Tahun 2004-2009”. Halaman 23. (tulisan tidak dipublikasikan)

1.6.5 Teknik Analisis Data

Delam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Pengumpulan data berupa studi dokumentasi, catatan, transkrip, buku, website resmi serta wawancara yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini berisi tentang gambaran umum permasalahan yang diteliti, mulai dari latar belakang masalah (LBM), rumusan masalah (RM), tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai data-data yang telah dihimpun. Di dalam bab ini akan ditunjukkan dan dijelaskan lebih luas tentang peredaran narkoba di Indonesia mulai dari jumlah kasus hingga tindakan-tindakan yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

BAB III

Bab ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat sindikat narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai wilayah bisnis strategisnya beserta dengan data dan analisisnya.

BAB IV

Bab ini akan berisikan kesimpulan terhadap penelitian dan pembahasan (bab II, bab III), dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya.